

HUBUNGAN AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN KEJADIAN UNMET NEED PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

Oleh:

M Karjono¹ ; Zilvia²

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, FIKKM Universitas Pendidikan Mandalika

²Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat FIKKM Universitas Pendidikan Mandalika

*karjono@undikma.ac.id

Abstrak : *Unmet need KB* adalah suatu persentase yang menunjukkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi pada wanita Pasangan Usia Subur yang aktif secara seksual namun tidak menginginkan anak, baik untuk tujuan menghentikan kelahiran (stop childbearing) maupun menunda kelahiran (delay childbearing). Di Indonesia, angka unmet need KB di kategorikan masih tinggi selama kurun waktu empat tahun terakhir walaupun terjadi fluktuasi antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, poisi unmet need sebesar 18,3% turun menjadi 15,8% pada tahun 2016, naik menjadi 17,50% pada tahun 2017 dan Kembali turun menjadi 12,4 % pada tahun 2018. Angka unmet need dari tahun ke tahun tersebut masih belum mencapai angka unmet need yang ditargetkan oleh BKKBN yaitu sebesar 7,4%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian Unmet Need Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan Teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 99 responden. Data yang sudah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian Unmet Need Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dengan Nilai P-value = 0,000. Disarankan Bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat perlunya meningkatkan intensitas penyuluhan dan pemberian informasi sebagai upaya promotif mengenai alat kontrasepsi yang meliputi cara pakai, kegunaan, kelebihan dan kekurangan ataupun efek samping dari setiap metode kontrasepsi terutama bagi kelompok dengan risiko unmet need tinggi yaitu wanita pasangan usia subur pada usia reproduksi tua, memiliki jumlah anak hidup lebih dari 2 dan berpendidikan rendah..

Kata Kunci : Akses Pelayanan KB, *Unmet Need*

PENDAHULUAN

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi nomor empat di dunia dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 2010 - 2015 sebesar 1,43%. Angka LPP tersebut masih jauh dari angka yang diperkirakan akan menurun dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045 yaitu sebesar 1,07% pada periode 2015 - 2020. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia masih akan terus mengalami peningkatan dari 269,6 juta pada 2020, menjadi 294,1 juta di tahun 2030. dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta pada 2045 nanti (Supas, 2019).

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah serius untuk menanggulangi peningkatan LPP yang terus meningkat, salah satunya yaitu melalui kebijakan Program Keluarga Berencana (KB). Program KB selain menjadi program nasional, juga menjadi salah satu target yang perlu dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDG'S)* yaitu target pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi serta sosialisasi program penurunan kelahiran yang efektif dan efisien. Untuk menilai keberhasilan dari program KB salah satunya dapat dilihat dari indikator

angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*). TFR Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,45 per wanita usia subur, kemudian menurun menjadi 2,24 pada tahun 2021. Walaupun demikian, angka TFR tersebut masih belum mencapai angka yang ditargetkan oleh BKKBN di dalam RENSTRA BKKBN 2020-2024 yaitu sebesar 2,1 per wanita usia subur (BKKBN, 2021).

Unmet need KB adalah suatu persentase yang menunjukkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi pada wanita Pasangan Usia Subur yang aktif secara seksual namun tidak menginginkan anak, baik untuk tujuan menghentikan kelahiran (stop childbearing) maupun menunda kelahiran (delay childbearing). Di Indonesia, angka unmet need KB di kategorikan masih tinggi selama kurun waktu empat tahun terakhir walaupun terjadi fluktuasi antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, poisi *unmet need* sebesar 18,3% turun menjadi 15,8% pada tahun 2016, naik menjadi 17,50% pada tahun 2017 dan Kembali turun menjadi 12,4 % pada tahun 2018. (Survei RPJMN 2016-2018). Angka *unmet need* dari tahun ke tahun tersebut masih belum mencapai angka unmet need yang ditargetkan oleh BKKBN di dalam RENSTRA

BKKBN 2020-2024 yaitu sebesar 7,4% (BKKBN, 2020).

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), angka unmet need KB pada tahun 2022 sebesar 16,69 % (BKKBN: PK 21), Menurut data terbaru tahun 2022 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagian Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan. Dari 10 kecamatan memiliki persentase unmet need yaitu Kecamatan Gerung 5,76%, Lingsar 6,29%, Batulayar 6,92%, Narmada 7,05%, Sekotong 9,23% Kediri 11,72%, Kuripan 11,72%, %, Lembar 11,89%, Gunungsari 14,89%, , Labuapi 19,20, (DALDUKKB, 2021).

Akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang berkualitas merupakan suatu unsur penting dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana tercantum dalam program ICPD, Kairo tahun 1994. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau dan akseptabel (Saifuddin, 2003). Akses dibagi menjadi tiga aspek, yaitu akses geografis, ekonomi dan sosial. Akses geografis didefinisikan sebagai kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang diukur dari jarak, waktu tempuh, jenis transportasi, dan prasarana jalan. Akses ekonomi menekankan pada kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mengakses layanan kesehatan. Sedangkan pendekatan sosial lebih kepada komunikasi, budaya, keramahan dan kepuasan pelayanan (Laksono, 2016)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak terkait pada bulan November 2022 di Kecamatan Gunungsari. Kepada 10 istri PUS terkait akses pelayanan di fasilitas KB menghasilkan 6 istri PUS (60%) ber-KB karna jaraknya dekat, ada biaya dan didukung suami, 2 istri PUS (20%) menyatakan ber-KB walaupun jaraknya jauh, mampu membayar dan ada dukungan dari suami dan 1 istri PUS (10%) menyatakan ada keinginan ber-KB walaupun jaraknya jauh, ada biaya dan ada dukungan dari suami, sedangkan 1 istri PUS (10%) menyatakan tidak ber-KB karena tidak ada dukungan dari suami walaupun mampu membayar dan jaraknya dekat

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, yaitu terdiri atas variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Penelitian yang dilakukan menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah PUS sebanyak 18.791 tahun 2022 di Kecamatan Gunungsari. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin yaitu sebanyak 99 orang. Teknik sampel ditentukan dengan metode non probability sampling,

dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik cluster random sampling. Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tahun 2023. Variabel independen yaitu Akses Pelayanan KB dan variabel dependen yaitu kejadian *unmet need*. Instrumen pengumpulan data yaitu kuesioner. Analisis data menggunakan *Uji Chi-Square test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Univariat Frekuensi Akses Pelayanan Keluarga Berencana di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tahun 2023

Tabel 1. Identifikasi Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2023

Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	F	%
Terjangkau	79	79,8 %
Tidak Terjangkau	20	20,2 %
Jumlah	99	100 %

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana (KB) terjangkau sebanyak 79 Responden (79,8%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana (KB) tidak terjangkau sebanyak 20 responden (20,2%).

b. Analisis Univariat Kejadian *Unmet Need* di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tahun 2023

Tabel 2. Identifikasi Kejadian *Unmet Need* Tahun 2023

Kejadian <i>Unmet Need</i>	F	%
<i>Tidak Unmet Need</i>	71	71,7 %
<i>Unmet need</i>	28	28,3 %
Jumlah	99	100 %

Sumber: Laporan KB UPT PPKB Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas tentang Kejadian *Unmet Need*, Responden yang Tidak *Unmet Need* sebanyak 71 Responden (71,7%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang *unmet need* sebanyak 28 responden (28,3%).

c. Analisis Bivariat Hubungan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Tabel 3. Hubungan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan *Kejadian Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Kejadian <i>Unmet Need</i>						<i>P value</i>
	<u>Tidak <i>Unmet Need</i></u>		<u><i>Unmet Need</i></u>		<u>Total</u>		
	F	%	F	%	F	%	
Terjangkau	71	89,9%	8	10,1%	79	100%	0,000
Tidak Terjangkau	0	0,0%	20	100%	20	100%	
Total	71	71,7%	28	28,3%	99	100%	

CI; 95%; $\alpha=0,05$

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana terjangkau yang tidak *unmet need* sebanyak 71 orang (71,7%) lebih besar dari pada responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau yang tidak *unmet need* sebanyak 0 orang (0,0%). Responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana terjangkau yang *unmet need* sebanyak 8 orang (10,1%) lebih kecil dari pada responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau yang *unmet need* sebanyak 20 orang (20,2%).

Hasil uji statistic menggunakan *Chi-Square* diperoleh hasil *P-value* = 0,000 dengan $\alpha = 0,05$ (signifikansi). Hasil ini menunjukkan bahwa ada Hubungan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

PEMBAHASAN

a. Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian Responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana (KB) terjangkau sebanyak 79 Responden (79,8%) lebih banyak dibandingkan dengan responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana (KB) tidak terjangkau sebanyak 20 responden (20,2%).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan mudah menjangkau akses pelayanan KB karena Fasilitas Kesehatan sudah tersebar di seluruh wilayah desa di kecamatan gunungsari tiap-tiap desa sudah memiliki poskesdes dan ditambah dengan puskesmas pembantu dan klinik swasta atau PMB serta keadaan jalan yang sebagian besar sudah di aspal menjadi kemudahan untuk datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan keluarga berencana dimana akses merupakan salah satu faktor yang berperan dalam

menentukan akses pelayanan kesehatan yang dinilai dari jarak, waktu tempuh dan ketersediaan transportasi untuk menjangkau faskes KB (Dever, 2008). Akses untuk memanfaatkan pelayanan keluarga berencana yang dibuat oleh BPS dalam mengelompokkan rata-rata jarak terdekat (km) dari rumah tangga ke fasilitas umum yaitu dikategorikan dengan jika jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan $\leq 2,5$ km dan jauh jika jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan $> 2,5$ km (BPS, 2012). disamping itu untuk biaya pelayanan KB sebagian besar menyatakan murah, dan responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau sebagian masih ada yang menyatakan biaya pelayanan KB mahal, dimana semakin tinggi ekenomi seseorang akses ke pelayanan kesehatan akan lebih di perhatikan dan mudah dijangkau, demikian juga sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah maka akan sulit menjangkau pelayanan, keadaan ini yang akan dapat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan (Davi, 2016).

Responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau sebagian besar dikarenakan masih merasakan biaya untuk menggunakan KB masih mahal.

Menurut Laksono (2016) Akses dibagi menjadi tiga aspek, yaitu akses geografis, ekonomi dan sosial. Akses geografis didefinisikan sebagai kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang diukur dari jarak, waktu tempuh, jenis transportasi, dan prasarana jalan. Akses ekonomi menekankan pada kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mengakses layanan kesehatan. Sedangkan pendekatan sosial lebih kepada komunikasi, budaya, keramahan dan kepuasan pelayanan.

Menurut BKKBN (2019) pasangan usia subur dengan kondisi ekonomi lemah diasumsikan kurang memberikan dukungan yang positif terhadap gerakan KB nasional. Ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya *unmet need*. Hal ini mungkin dikarenakan golongan ini masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dari pada kebutuhan yang lain. Sebaliknya keluarga dengan kondisi sosial

ekonomi yang lebih baik diasumsikan akan memberikan dukungan yang positif yang ditandai dengan keikutsertaan KB yang tinggi. sedangkan untuk aspek sosial dalam hal ini dukungan suami merupakan salah satu variabel sosial budaya yang sangat berpengaruh terhadap pemakaian alat kontrasepsi bagi kaum wanita sebagai istri secara khusus, dan di dalam keluarga secara umumnya. Budaya patrilineal yang menjadikan pria sebagai kepala keluarga banyak dianut sebagai pola keluarga di dunia menjadikan referensi suami terhadap fertilitas dan pandangan serta pengetahuannya terhadap program KB akan sangat berpengaruh terhadap keputusan di dalam keluarga untuk menggunakan alat atau cara KB tertentu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanna (2012) dengan judul "hubungan beberapa faktor akseptor dengan pemilihan alat kontrasepsi suntik pada wanita PUS pada keluarga Pra KS dan KS1 di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Triwulan I 2012" yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa aksesibilitas berupa biaya pelayanan dan lokasi yang terjangkau dalam kategori baik sebanyak 45 responden (68,2%).

b. Kejadian *Unmet Need* di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kejadian *Unmet Need*, Responden yang *Unmet Need* sebanyak 28 Responden (28,3%) dan responden yang tidak *unmet need* sebanyak 71 responden (71,7%). Masih adanya *unmet need* ini menandakan masih terdapat pasangan usia subur yang ingin menunda kehamilan atau ingin membatasi kelahiran akan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya baik itu tidak ingin mempunyai anak lagi atau dengan tujuan ingin menjarangkan kehamilannya (Juliaan, 2009). *Unmet need* KB ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat reproduksi perempuan dan perilaku kontrasepsi (WHO, 2014). Adapun alasan yang disampaikan oleh responden menjawab bervariasi meliputi sudah merasa tua tidak perlu KB, tidak ada alat/obat KB yang cocok, baru memiliki anak 1 dan ingin punya anak lagi, selanjutnya karena takut adanya efek samping, riwayat KB sebelumnya dan suami menolak KB, ketidaksetujuan suami terhadap pemakaian alat kontrasepsi dengan alasan bahwa suami menginginkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dari yang telah mereka punya dan suami menentang istrinya menggunakan alat kontrasepsi karena suami menginginkan anak dengan jumlah tertentu sebagai pewaris keturunan dan membantu mencari nafkah dalam keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hedrina (2011). yang menyatakan bahwa terdapat dua alasan penyebab terjadinya *unmet need*

KB yaitu kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi yang berakibat terjadinya gangguan kesehatan dan larangan suami, penentangan suami terhadap pemakaian alat kontrasepsi.

c. Hubungan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis bivariat responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana terjangkau yang tidak *unmet need* sebanyak 71 orang (71,7%) dan responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana terjangkau yang *unmet need* sebanyak 8 orang (8,1%) hal ini bisa terjadi karena ada faktor lain selain akses pelayanan keluarga berencana yang mempengaruhi kejadian *unmet need* diantaranya dikarenakan efek samping terhadap KB, Riwayat penggunaan kontrasepsi menjadi salah satu penyebab kejadian *unmet need* KB. Riwayat ber-KB yang ditimbulkan sebelumnya seperti kegagalan kontrasepsi sebelumnya dan trauma yang ditimbulkan dari efek samping kontrasepsi (SDKI, 2017). Responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau yang tidak *unmet need* sebanyak 0 orang (0,0%) hal ini bisa terjadi karena kebutuhan responden terhadap pelayanan keluarga berencana sudah terpenuhi, dan responden yang merasakan akses pelayanan keluarga berencana tidak terjangkau yang *unmet need* sebanyak 20 orang (20,2%). Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar responden yang tidak menggunakan KB karena menganggap biaya pelayanan KB mahal serta dukungan dari suami kurang dan sebagian kecil merasakan jarak ke tempat pelayanan jauh dan sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023

Hasil uji statistik menggunakan *Chi-Square* diperoleh hasil $P\ value = 0,000 < \alpha = 0,05$ (signifikansi). Hasil ini menunjukkan bahwa ada Hubungan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.

Responden yang merasakan akses pelayanan terjangkau mempunyai peluang lebih tinggi untuk memanfaatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan yang sudah tersedia dibandingkan dengan responden yang merasakan akses pelayanan KB tidak terjangkau. serta didukung dengan pemanfaatan BPJS Kesehatan yang menanggung layanan KB bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang sudah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Misalnya,

puskesmas, dokter keluarga, klinik swasta, sampai rumah sakit tipe D atau setara faskes tingkat pertama lainnya hal ini semakin mendukung masyarakat terutama PUS untuk menjangkau akses pelayanan KB di samping PUS yang tidak memiliki BPJS bisa mendapatkan pelayanan KB gratis oleh BKKBN. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat, dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu (Azwar, 2010).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian di Salatiga yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan bermakna secara statistik antara akses pelayanan dan kejadian *unmet need* (Mawarni, 2016:36). Hal ini memperlihatkan bahwa untuk wanita yang mempunyai akses baik maupun akses kurang mengenai akses layanan KB tidak dapat menyebabkan secara pasti kejadian *unmet need* (Mawarni, 2016:37). Hal yang berbeda ditemukan dalam penelitian Baroya (2011:59) yang menyatakan bahwa peluang terjadinya *unmet need* 1,2 kali lebih besar pada wanita dengan masalah akses ke pelayanan KB dibandingkan dengan yang tidak mempunyai masalah.

PENUTUP

a. Simpulan

1. Responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana (KB) terjangkau sebanyak 79 responden (79,8%) dan responden yang memiliki akses pelayanan keluarga berencana (KB) tidak terjangkau sebanyak 20 responden (20,2%).
2. Responden yang tidak *unmet need* sebanyak 71 responden (71,7%), Responden yang *unmet Need* sebanyak 28 Responden (28,3%).
3. Ada hubungan yang signifikan antara akses pelayanan keluarga berencana (KB) dengan Kejadian *Unmet Need* pada PUS di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dimana nilai *P-value* 0,000 (*P-value* < 0,05).

b. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswi tentang pentingnya pengetahuan *unmet need* keluarga berencana pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan untuk menambah referensi bagi pihak pendidikan dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Mandalika.
2. Bagi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

(PLKB)

Diharapkan sebagai bahan masukan perlunya meningkatkan intensitas penyuluhan dan pemberian informasi sebagai upaya promotif mengenai alat kontrasepsi yang meliputi cara pakai, kegunaan, kelebihan dan kekurangan ataupun efek samping dari setiap metode kontrasepsi terutama bagi kelompok dengan risiko *unmet need* tinggi yaitu wanita pasangan usia subur pada usia reproduksi tua, memiliki jumlah anak hidup lebih dari 2 dan berpendidikan rendah.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti akses pelayanan KB dengan kejadian *unmet need* masih terdapat beberapa faktor lainnya yang berhubungan dengan kejadian *unmet need* KB yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti faktor lingkungan, budaya, agama, dan faktor-faktor lainnya untuk mengoptimalkan hasil penelitian pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar,A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Bina Rupa Aksara
- Baroya, N. 2011. Pemenuhan Kebutuhan Kontrasepsi Keluarga Miskin di Indonesia pada Masa Desentralisasi. IKESMA, 7(1):48-64.
- BKKBN. 2019. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN, 1–43.
- BKKBN. 2020. Target Unmet Need Dalam Rencana Strategis BKKBN 2020-2024.
- BKKBN. 2021. Pendataan Keluarga Tahun 2021.
- DALDUKKB. (2021). Program KB dan Kesehatan Reproduksi PUS Bukan Peserta KB. Nusa Tenggara Barat.
- Davi, M (2016). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemanfataann Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cibeureum Studi pada Keluarga Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2016. Skripsi : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi.
- Dever, G. A., 2008. Epidemiology in Health Service Management. Maryland: Aspen System Corporation.
- DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat. (2022). Capaian Unmet Need KB Kecamatan Gunungsari.
- Badan Pusat Statistik.Pelatihan demografi[home page on internet]. Available from: chnrl.org/pelatihan-demografi/SDKI-2012.pdf diakses tanggal 21 Juni 2023

- Hanna, A. 2012. Hubungan beberapa faktor akseptor dengan pemilihan alat kontrasepsi suntik pada wanita PUS pada keluarga Pra KS dan KS1 di kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Triwulan I 2012. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2, tahun 2012 halaman 133-142.
- Hedrina, Emi. 2011. Faktor Determinan Unmet need Suatu Studi Kasus di Kelurahan Kayau Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi, <https://pasca.unad.ac.id>, diakses tanggal 29 Mei 2023.
- Juliaan, F. (2009). Analisis Lanjut SDKI 2017 : Unmet Need dan Kebutuhan Pelayanan KB di Indonesia. *BKKBN*, 91, 399–404.
- Laksono, AD. 2016. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Mawarni, Atik. 2016. Hubungan Persepsi Akses dan Pelayanan KB dengan Kejadian Unmet Need. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*.
- SDKI. 2012. Faktor yang mempengaruhi individu tidak menggunakan kontrasepsi
- SDKI. 2017. *Survei Demografi dan Kesehatan 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Survei Penduduk Antar Sensus. 2019. *Data Survei Penduduk Antar Sensus*
- Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 2018. Target TFR nasional.
- Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 2018. Angka Cakupan Unmet Need.